

Heemskerk, 25 Mei 2021

Perihal : Balasan surat 210503 (arsip tentang keadaan di Indonesia)

Liesbeth yang terhormat,

Terima kasih atas surat Anda. Berkali-kali saya katakan bahwa jika bukan karena Anda, para korban tidak akan tertolong, dan kita tidak akan pernah sampai sejauh ini. Setiap kali orang mengklaim bahwa Anda melakukan ini demi uang, saya selalu langsung menolaknya. Ketika saya diwawancarai saya juga mengatakan seperti itu. (Sayangnya, itu tidak pernah ditulis oleh wartawan yang mewawancarai saya.) Berkali-kali, saya tekankan bahwa Anda tidak meminta sepeserpun pada saat itu. Saya juga memaparkan bahwa Anda pergi bersama kami ke Rawagede dan Sumatra selama sepuluh hari dengan biaya sendiri, di mana Anna Jonkhoff merasa sangat senang bisa bergabung dengan kita.

Dalam surat Anda, sepertinya ini semua masalah pribadi antara Anda dan saya. Bagaimanapun juga, Anda membuatnya sangat jelas bahwa perasaan terluka Anda sangat membebani dalam menolak korban. Bahwa Anda tidak punya waktu lagi terdengar seperti alasan, karena Anda selalu sibuk. Ini bukan tentang kita dan bagaimana hubungan kita memburuk akhir-akhir ini. Ini tentang pelanggaran hak asasi manusia tingkat atas, 400 tahun pembagian dan penaklukan rasis melalui sistem kolonial Belanda. Ini tidak ada hubungannya dengan politik, tetapi dengan ketidakadilan yang perlu diluruskan. Saat berusia enam belas tahun, saya diberitahu bahwa “ kalian Indonesia teroris, ekstremis, perampok”, dan juga Sukarno adalah seorang kolaborator.

Dalam gugatan pertama tentang Rawagede Anda menyebutkan dalam pembelaan bahwa buku 'Terlarang untuk anjing dan inlanders' [cercaan untuk penduduk asli] telah berada di meja Anda dalam waktu yang lama, itulah yang Anda katakan kepada hakim. Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak akan mengetahui semua ini jika Anda tidak bertemu saya, Anda menyebut saya ensiklopedia berjalan. Kurangnya pengetahuan tentang kolonialisme dan rasisme ini terus berlanjut. Seseorang seperti Jan Pieterszoon Coen masih dipuja sampai sekarang dalam pameran 'I Love Banda.' Bayangkan jika seorang Jerman membuat seri foto berjudul 'I Love Westerbork'!? Dan kemudian ada penyiar TV NOS yang kolonial memberitakan: 'Film tentang Hindia Belanda menunjukkan sisi berdarah dari niat yang baik'. Singkatnya: Belanda adalah dan akan tetap menjadi negara penjajah yang rasis, bahkan setelah semua tuntutan hukum yang kami ajukan.

Ada banyak perhatian untuk film 'De Oost' baru-baru ini, bahkan surat terbuka dari putri perwira Raymond Westerling. Tapi tidak ada yang menjelaskan bagaimana yayasan kami mewakili para korban aksi militer mengerikan yang terlihat dalam film tersebut. Di Radio 1, Willem Frank de Nood, editor di Nieuws BV, bebas mengajukan pertanyaan apakah Westerling adalah penjahat atau pahlawan. Mereka menunjukkan potongan pendek (video) Piet De Blaauw dari Pak Monji dan saya di Suppa, tanpa menyebutkan konteks atau nama kami. Selalu berbicara seolah-olah Indonesia adalah milik Belanda.

Bahwa hanya kasus Lambogo yang sekarang telah dimenangkan seharusnya membuat Anda berpikir tentang proses peradilan. Betapa tidak adilnya bagi negara untuk lolos begitu saja? Mengapa saya tidak mendengar Anda berbicara tentang cara hukum kolonial (Eropa) diterapkan secara salah kepada orang-orang yang bahkan tidak dianggap manusia pada saat itu. Mereka selalu berbicara seolah-olah penjajahan Belanda di Indonesia adalah hal biasa. Justru secara hukum, kami memiliki peluang di sini. Seluruh peraturan perundang-undangan kolonial tidak didasarkan pada persamaan hak asasi manusia.

Selama bertahun-tahun, Anda telah bekerja untuk para korban, yang membuat saya berpikir untuk waktu yang lama bahwa Anda adalah salah satu dari sedikit orang Belanda yang setidaknya mengerti apa yang saya perjuangkan. Tadinya saya pikir Anda akan menggulingkan 'sapi suci' Anda untuk mencoba jalan baru.

Apa yang menurut saya paling sulit untuk diterima adalah Anda mengikuti prinsip kolonial kekerasan 'ekstrem'. Tuntutan hukum telah membuat prinsip ini menjadi nampak, dan kami telah menunjukkan bahwa itu masih digunakan untuk membenarkan penjajahan. Tapi tidak pernah ada niat saya untuk mengikuti cara berpikir seperti itu. Seperti juga pengadilan, Anda berbicara seolah-olah kekerasan tentara Belanda terhadap orang Indonesia yang bersenjata adalah 'sah' dan hanya kekerasan tentara Belanda terhadap warga sipil Indonesia yang tidak dapat diterima. Dan kemudian Anda tersinggung karena saya menyebut pemikiran ini kolonial? Tidak ada kata lain untuk itu! Seberapa sering saya mengajukan pertanyaan "dari mana Belanda mendapat hak bahwa tanah air 18.000 kilometer jauh sebagai miliknya?" Anda selalu setuju dengan saya melalui telepon, tetapi apakah Anda jujur saat itu? Anda tidak pernah mempermasalahkan sistem Belanda (negara dan pengadilan) dalam hal ini. Sebaliknya, Anda menerimanya, dan seperti juga mereka, Anda berbicara tentang 'kekerasan ekstrem'.

Atas dasar ini Anda sekarang mengatakan: "Maaf Jeffry, maaf korban Indonesia, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda sekalian."

Masalahnya bukan Anda tidak tahu dimana saya berpihak. Saya mengutarakan komentar dan pendapat saya dalam PDF putusan hakim yang saya lampirkan, dapat dilihat pada berkas berjudul '12 -1165 + 14-96 + 14-653 + 14-1020 + 14-1021_Jeffry'. Saya melakukan hal yang sama pada tahun 2017 dalam berkas WORD dengan nama 'Keputusan Achmand_kalah karena kadaluarsa_Jeffry' Selain itu, ada surat saya pada Desember 2019 kepada pengadilan.

Adapun opini Marjolein di Jakarta post, saya tidak bisa tidak setuju dengannya karena dia menjelaskan dengan sangat baik apa yang begitu kolonial dari gagasan 'kekerasan ekstrem' itu. Ini perlu dibicarakan!

Sayangnya, saya harus menyimpulkan bahwa sejak Anda tidak lagi terlibat langsung dalam kasus-kasus tersebut, segalanya benar-benar menurun. Saya memberi tahu Anda melalui telepon, dan Anda mengatakan pada saat itu bahwa Brechtje bekerja dengan cara yang beda. Saya menangkapnya Anda setuju dengan saya.

Meskipun Anda menulis dalam surat Anda bahwa Anda bersimpati, saya baca Anda sebut saya 'frustrasi', dan ke-'frustrasi'-an saya lah penyebab 'hilangnya kepercayaan' yang mengakibatkan Anda tidak lagi ingin melanjutkan (perjuangan ini lagi). Ini pemutar-balikan masalah. Rupanya Anda sudah memutuskan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan para korban yang Anda wakili, bahwa Anda sudah tidak lagi mengajukan kasus yang melawan negara. Padahal, (perjuangan) kita sama sekali belum selesai!

Anda ingat dalam kasus penolakan wajib militer yang dikirim ke Indonesia kami bawa Dewan Tinggi jawabannya kasus ini harus diselesaikan secara politis? Saya pikir, dalam semua kasus ini, pengadilan seharusnya menunjukkan bahwa pengadilan tidak dalam posisi untuk menangani kasus-kasus korban Indonesia dengan adil, karena hukumnya kolonial. Mereka seharusnya mengadvokasi peradilan Nuremberg versi Belanda. Jadi masalahnya bukan saya memiliki harapan yang lebih tinggi. Belanda salah di sini, titik, tanpa koma. Saya rupanya tidak diijinkan mengatakan ini, karena Belanda ingin mempertahankan keoplosannya.

Surat Anda kepada saya menunjukkan seolah-olah ini masalah Anda secara pribadi, Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenali diri Anda sendiri dalam 'tuduhan-tuduhan itu'. Pertama-tama, saya tidak menuduh Anda, saya hanya menjelaskan bagaimana sistem bekerja, dan apa yang (disebut) kolonial dalam proses hukum. Terlebih lagi, dalam melawan sistem kolonial, pandangannya selalu bersifat pribadi. Setiap orang berhak memilih, dan pilihan itu memiliki konsekuensi. Anda melawan sistem tapi juga mengikutinya. Ini sama pribadinya dengan orang-orang yang dibunuh oleh Belanda, yang sekarang barang buktinya dipertanyakan oleh negara. Sama pribadinya dengan media Belanda yang menyebut nama Anda dalam (berita) artikel, tapi mengabaikan saya dan yayasan, membuat kesan bahwa Anda adalah inisiatornya. Tentu saja, Anda tidak bisa menahan media Belanda yang begitu rasis sehingga mereka lebih suka mendengarkan seorang wanita kulit putih yang bicarannya tidak sekeras saya, orang Indonesia, tetapi kan Anda dapat menentang dan mengerahkan mereka.

Anda juga sering membuat pernyataan bahwa negara tidak perlu khawatir tentang jumlah klaim karena Anda pikir klaim-klaim tersebut tidak akan terwujud. Sementara Anda tidak bisa tahu apa yang diinginkan 270 juta orang Indonesia, bukan? Bisa jadi negara Belanda masih akan menerima klaim dari Indonesia atas segala sesuatu yang mereka rampok selama masa penjajahan. Negara tentu saja takut akan hal ini, dan memang demikian menurut saya. Bagaimanapun, sebagai pengacara, Anda bukan orang yang membuat keputusan atas para korban. Yang dapat Anda lakukan adalah menolak kasus, seperti yang Anda lakukan sekarang.

Dan saya harus bilang, saya kecewa karena Anda tampaknya merasa sangat tersinggung sehingga Anda bahkan memutus komunikasi. Hal terakhir yang saya terima dari Anda adalah pesan Whatsapp kabar mosi di parlemen dari Sjoerdsma dilanjutkan dengan Whatsapp kedua hanya dengan tanda seru. Ketika saya menelepon Anda dengan nomor saya yang lain, Anda tidak mengangkatnya, dan ketika saya mengirim sms Anda tidak menjawab, padahal pesan suara Anda meminta (untuk menghubungi Anda). Sepertinya saya tiba-tiba menjadi warga kelas dua. Ketika Anda menelepon saya, saya angkat telepon dengan sopan.



19 Februari yang lalu Anda masih mengatakan bahwa sayangnya Anda tidak dapat berbuat apa-apa lagi dalam hal undang-undang pembatasan, sementara Anda kemudian mengirim saya aplikasi hanya dengan tanda seru. Ini adalah situasi yang pahit bagi para korban bahwa Anda sekarang mengajukan berkas mereka dengan sebutan 'kasus baru'. Kami dengan hormat tetapi mendesak meminta Anda untuk mengajukan perjanjian penyelesaian perkara untuk semua kasus yang telah diajukan (karena bukan kasus baru). Ini juga menyangkut kasus janda Mari, Tari, Tija dan Ida.

Pada tahun 2018, Anda berbicara dengan, antara lain, anak-anak Rawagede, dan kami menyusun daftar 500 nama. Adapun argumen bahwa pada saat itu tidak cukup bukti, kami masih dapat meminta bukti tambahan. Terlepas dari itu, saya pikir ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana sistem masih kolonial. Para korbanlah yang kini harus memberikan bukti status sipil mereka pada masa kolonial, sementara Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa administrasi rezim Belanda tidak akurat. Ini adalah dasar dimana kasus mereka dihentikan. Bagaimana mungkin seorang janda tidak bisa dipercaya, kalau sistem kolonial tidak mencatat datanya? Pengadilan ada untuk mengangkat ketidakakuratan hukum tersebut. Dan apakah kita berhasil atau tidak, itu adalah upaya untuk mengangkat masalah. Tanpa tuntutan hukum, orang-orang di Belanda tidak mau mendengarkan.

K.U.K.B. stichting gevestigd te Vroegeling 3 1964 KP Heemskerk, Nederland.

www.kukb.nl T. +31 (0) 6 38613795 jeffry@kukb.nl

Rekeningnummer 13.19.28.341 Heemskerk (Rabobank). IBAN NL57 RABO 0131 9283 41. BIC (Swift) RABONL2U.

Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34271716.